

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa kebijakan subsidi pupuk pada indikator ketepatan waktu sudah efektif (76,0%). Indikator ketepatan jumlah tergolong efektif (80,3%), indikator jenis pupuk tergolong efektif (78,9%), Indikator ketepatan sasaran tergolong efektif (75,1%), indikator mutu tergolong efektif (73,9%) dan indikator harga juga tergolong efektif (69,3%) dari perolehan data tersebut efektifitas enam indikator tetap harus ditingkatkan atau dipertahankan. Secara menyeluruh kebijakan pemerintah terhadap subsidi pupuk di Kabupaten Pringsewu ditinjau dari enam indikator termasuk dalam kategori efektif dengan rata-rata persentase pencapaian sebesar 75,2%.

B. Saran

1. Subsidi pupuk hendaknya diberikan kepada petani dan bukan kepada badan usaha yang memproduksinya melalui daftar atau list penerima subsidi yang sudah terdaftar melalui kelompok tani masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar distribusi tersebut tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenisnya, tepat sasaran, tepat mutu atau kualitasnya serta tepat harganya.
2. Pemberian subsidi pupuk kepada petani telah disesuaikan dengan kebutuhan para petani, yang mana kebutuhan telah ditetapkan berdasarkan

atas keputusan bersama antara petani dengan petugas pemerintah dan keterlambatan pasokan pupuk kepada kios-kios pengecer menjadi salah satu penyebab terhambatnya distribusi pupuk bersubsidi oleh karenanya perlu dilakukan upaya antisipasi dengan menerapkan pengawasan yang lebih terarah dan terstruktur sehingga keenam indikator yang sudah berjalan efektif tersebut dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

3. Pemerintah Kabupaten Pringsewu dituntut menerapkan ketegasan dalam pelaksanaan pendistribusian pupuk bersubsidi. Dengan otoritas otonomi daerah maka pendistribusian pupuk dapat dilakukan pemerintah Kabupaten Pringsewu melalui kebijakan sendiri. Merekomendasikan agar penyaluran subsidi pupuk kembali ke sistem RDKK (Rencana Definit Kebutuhan Kelompok) atau memotong jalur distribusi dari distributor langsung ke petani agar penyimpangan dapat diminimalisir.
4. Pemerintah Kabupaten Pringsewu hendaknya mengimplementasikan kebijakan pupuk bersubsidi melalui upaya penyuluhan kepada petani melalui kelompok-kelompok tani di Kabupaten Pringsewu. Hal itu dimaksudkan agar petani tahu bahwa harga pupuk yang dibeli mengandung subsidi. Hendaknya dibedakan kios resmi penjual pupuk bersubsidi dengan kios penjual pupuk non-subsidi. Hal ini dimaksudkan agar petani mudah mengontrol apabila kios-kios pengecer resmi tersebut menjual pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi.